



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PASER
UNIT KERJA : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NUR ASNI**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **646843**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.356.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 202 m2/133 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 455.000.000
2. Tanah Seluas 321 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 56.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
4. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
5. Tanah Seluas 1089 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
6. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 238 m2/198 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 1.650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 88.000.000**

1. MOBIL, chevrolet AVEO.52 MT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, HONDA X1NO2Q43LO A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 133.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	300.633.337
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.878.133.337
III. HUTANG	Rp.	827.933.085
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.050.200.252

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.